

**Implementasi Pembangunan Pertanian Di Era Otonomi Desa
(Studi Kasus Desa Pucung Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan)**

***Implementation Of Agricultural Development In The Era Of Village Autonomy
(Case Study Of Pucung Village Tirto District Pekalongan Regency)***

Fadia Ashila Zahra¹, Farida Rohmah²

fadiaashilazahra@mhs.uingsdur.ac.id¹, farida.rohmah@uingsdur.ac.id²

Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan

Abstract.

This research describes the implementation of agricultural development in the era of village autonomy by allocating village funds according to regulations that will be used for agricultural development in Pucung Village, Tirto District, Pekalongan Regency. Apart from that, this research also identifies factors that can influence the implementation of village development with the provisions of Village autonomy. Pucung. The method used in this research is a qualitative descriptive method, to produce a picture of agricultural problems that occurred in Pucung Village from 2019 to 2021. This research uses policy indicators, extension and training activities, market demand for agricultural products, technology packages, credit. . business, development activities and infrastructure maintenance. The research results show that district and village level government policies provide participation in these indicators with the help of Village Fund Allocations and Regional Revenue and Expenditure Budgets through business entities such as BUMDes Sumber Makmur Pucung Village and the Tirto Regency Agricultural Extension Agency.

Keywords: Implementation; Agricultural Development; Village Autonomy

Abstrak.

Penelitian ini tentang pendeskripsian mengenai implementasi pembangunan pertanian di era otonomi desa dengan pengalokasian dana desa yang sesuai dengan peraturan untuk digunakan sebagai pembangunan pertanian di Desa Pucung Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, selain itu, penelitian ini juga sebagai identifikasi faktor yang dapat mempengaruhi implementasi pembangunan desa dengan ketentuan otonomi Desa Pucung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, untuk membuahakan gambaran permasalahan pertanian yang terjadi pada Desa Pucung pada tahun 2019 sampai 2021. Penelitian ini menggunakan indikator kebijakan, kegiatan penyuluhan dan pelatihan, adanya pasar permintaan hasil-hasil pertanian, paket teknologi, kredit usaha, kegiatan pengembangan pembangunan serta pemeliharaan sarana prasarana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah tingkat kabupaten maupun desa memberikan partisipasi indikator tersebut dengan bantuan dari Alokasi Dana Desa dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah melalui badan usaha seperti BUMDes Sumber Makmur Desa Pucung serta Badan Penyuluhan Pertanian Kecamatan Tirto.

Kata Kunci: Implementasi; Pembangunan Pertanian; Otonomi Desa

Pendahuluan

Pembangunan ekonomi merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian suatu negara dengan cara mempertimbangkan berbagai faktor-faktor penunjang suatu pembangunan ekonomi agar pembangunan tersebut dinyatakan berhasil dan mengalami kenaikan dalam perekonomian suatu negara. Di Indonesia sendiri, upaya pembangunan ekonomi terus dilakukan demi kesejahteraan rakyat Indonesia sebagai pengentas kemiskinan.

Berbagai indikator banyak digunakan untuk pembangunan ekonomi, salah satunya adalah indikator di sektor pertanian. Sektor pertanian memiliki peran penting dalam perekonomian di negara

berkembang. Ada beberapa peran sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi antara lain sebagai penyedia pangan, sebagai sumber tenaga kerja bagi sektor perekonomian lain, sebagai sumber bagi pertumbuhan ekonomi modern khususnya dalam tahap awal pembangunan dan sebagai sumber devisa dan masyarakat pedesaan merupakan pasar bagi produk yang dihasilkan dari sektor industri di perkotaan (Setyowati, 2012).

Pertanian di Indonesia, menjadi populasi terbanyak dari negara lain karena jumlah lahan dan mata pencaharian di Indonesia rata-rata dibidang pertanian disetiap desa yang ada. Desa memanfaatkan lahan yang ada untuk pertanian sebagai pemanfaatan ketahanan pangan yang nantiya juga menjadi bagian dari suatu pembangunan ekonomi. Karena pertanian merupakan satu sektor prioritas dalam pembangunan nasional berkelanjutan di negara agraris dan sekotnya menjadi kunci pembuka bagi keberhasilan pangan, pertumbuhan ekonomi, stabilitas dan keamanan (Dumasari, 2020)

Perwujudan sistem pertanian di desa dibantu dengan faktor eskternal berupa terjunnya peran perangkat desa serta badan-badan pengelola yang ada disuatu desa untuk memberikan sebuah kebijakan dengan berdasarkan otonomi suatu desa yang ada pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20014 tentang Desa yang berlandaskan pada undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; dan Perjalanan pembangunan pertanian Pembahasan diarahkan pada kebijakan pembangunan pertanian di daerah, implementasi kebijakan dan dampaknya dalam pembangunan pertanian di daerah (Mayrowani, 2012).

Implementasi berkaitan dengan kebijakan yang diambil dapat memberikan dampak positif pengembangan pertanian penunjang pembangunan ekonomi. Kebijakan ini juga perlu didukung perangkat lain sebagai daya penampung badan usaha yang dihasilkan dari produksi suatu lahan pertanian berdasarkan otonomi yang ada. Dalam Strategi Pembangunan Pertanian Berkelanjutan di Desa Sukadamai Kabupaten Bogor, memiliki tujuan perencanaan pembangunan pertanian berkelanjutan dengan adanya kebijakan penggunaan citra drone menjadi penunjang pembangunan ekonomi (Arham et al., 2019).

Kebijakan dari otonomi desa menjadi sebuah jalan yang diambil untuk menjadi tolak ukur lembaga-lembaga di desa untuk menggerakkan program-program pembangunan sarana dan prasarana pertanian, pemberdayaan masyarakat, pembiayaan dengan pembentukan badan usaha milik desa, penyediaan program bantuan anggaran penunjang peningkatan pertanian, serta dapat menganalisis faktor pendukung dan penghambat dari kegiatan pembangunan tersebut. Hal ini diterapkan pada salah satu desa di Kabupaten Pekalongan di Kecamatan Tirto Desa Pucung dengan harapan untuk mengetahui bagaimana implementasi pembangunan pertanian di era otonomi desa yang ada. Dengan informasi data pembangunan pertanian Desa Pucung pada tahun 2019 hingga tahun 2021 yang menyatakan bahwa di tahun 2019 terdapat informasi data tentang pekerjaan konstruksi dari satuan kerja ketahanan pangan dan pertanian Kabupaten Pekalongan untuk pembuatan jalan usaha tani Desa Pucung dengan menggunakan

anggaran APBD sebesar Rp. 145.000.000. Kemudian di tahun 2020 merencanakan penyelenggaraan upaya pembangunan pertanian desa dan diwujudkan pada tahun 2021 dengan penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 17.910.000.

Metode

Tempat penelitian yang dipilih adalah Desa Pucung Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan. Pemilihan tempat didasari oleh banyaknya luas lahan persawahan di desa Pucung yang masih subur karena ada sebuah pengelolaan yang didukung perangkat desa dengan pembentukan Badan Usaha Milik Desa yang menampung hasil usaha tani untuk menambah pendapatan masyarakat, pemberdayaan seperti bantuan anggaran dana desa untuk pengembangan pembangunan pertanian, adanya sekelompok tani sebagai penggarap pertanian, dan adanya dinas PMD Kecamatan Tirto yang kemudian dilanjutkan dengan informasi dari kecamatan Desa Pucung dengan kurun waktu 3 hari.

Sumber data dari penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk membuahakan gambaran permasalahan yang terjadi pada suatu tempat dan waktu tertentu. Dengan kajian literatur penelitian tentang implementasi pembangunan pertanian di era otonomi desa yang dimana penelitian sebelumnya membahas tentang bagaimana implementasi pembangunan pertanian, perencanaan pembangunan sektor pertanian, penyelarasan pembangunan pertanian antara daerah dan desa, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan sektor pertanian seperti pembangunan sarana prasana, pemberdayaan masyarakat, pembiayaan, serta pengembangan. Sedangkan penelitian ini, perencanaan pembangunan sektor pertaniannya digabung dengan bagaimana penyelarasan pembangunan pertanian antar daerah dan desa agar menjadi kesatuan yang berkesinambungan. Dalam hal ini juga memerlukan sebuah solusi penyelesaian dalam permasalahan penelitian yang diambil. Langkah yang diambil untuk penelitian ini dengan pendekatan wawancara, observasi dan dokumentasi.

Wawancara dilakukan dengan cara megajukan beberapa pertanyaan atau interview dengan data yang dapat diambil atau dikaji berupa penggunaan dana desa, alokasi pertanian desa, penyaluran bantuan bantuan penunjang pembangunan, serta pemberdayaan dari masyarkat untuk dukungan pembangunan dengan wawancara mendalam. Observasi dengan pengamatan untuk melihat indikator pembangunan dan pemberdayaan. Dan dokumen yang diambil tentang anggaran pendapatan dan belanja desa berkaian dengan pertanian Teknik pengambilan data untuk penunjang penelitian menggunakan teknik *purpose sampling* yaitu teknik mengambi sampel tidak berdasarkan random namun berdasarkan pertimbangan yang fokus pada tujuan tertentu dengan responden sebanyak 10 orang (Sugiyono, 2013). dilihat (Tabel 1).

Pembahasan

Implementasi Pembangunan Pertanian di Desa Pucung

Pembangunan pertanian Desa Pucung, Kecamatan Tirto Pekalongan yang di tuang dalam RPJMD maupun RKPD guna mengidentifikasi bagaimana pengimplementasian rencana pembangunan suatu daerah jangka menengah dan rencana kerja pembangunan daerah di bidang pertanian, maka adanya suatu

anggaran dan pelaksanaan sektor pertanian menjadi fokus utama untuk menyediakan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana, mempertahankan ketahanan pangan, penyediaan teknologi, dan usaha pemberdayaan masyarakat serta mendirikan badan usaha untuk penampungan usaha hasil dari pertanian tersebut.

Tabel 1. Responden Penelitian

No	Responden	Jumlah
1	Camat Tirto Kab. Pekalongan	1
2	Kasi PMD Trto	1
3	Koordinator Pendamping Desa Kecamatan Tirto	1
4	Ketua BPD Desa Pucung Trito	1
5	Para Ketua Kelompok Tani	3
6	Direktur BumDes Pucung	1
7	Pendamping Lokal Desa Pucung	1
8	Sekretaris Balai Penyuluhan Pertanian Tirto	1
Total		10

Sumber: Data Primer dengan *Purpose Sampling*

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, menjadi acuan untuk implementasi bagaimana perencanaan pembangunan daerah dan perencanaan pembangunan desa yang akan berkontribusi bersama untuk perwujudan pembangunan pertanian dibidang pertanian tanam pangan Desa Pucung berupa hasil pertanian seperti padi, jangung, sayuran serta tebu. Untuk itu perlu keselarasan paket teknologi yang didapat dari anggaran desa berdasarkan kondisi biofisik suatu wilayah terutama Desa Pucung.

Selain itu, pemerintah juga memberikan pengimplementasian pembangunan dengan memberikan perlindungan usaha tani padi di Kecamatan Tirto tersebut untuk menghadapi resiko terkait produksi dengan perubahan hasil panen yang tidak terduga karena ketidakpastian dari pihak-pihak eksternal. Adanya asuransi tani ini dianggap mampu mengurangi hasil gagal panen walaupun hingga saat ini pengelolaan asuransi belum dimaksimalkan. Berdasarkan penelitian (Klau et al., 2019) menjelaskan bahwa salah satu stragei untuk meningkatkan potensi pertanian di kawasan perdesaan adalah dengan menetapkan kawasan agropolitan yang disesuaikan dengan potensi yang dimiliki oleh wilayah.

Keselarasan Pembangunan Pertanian antara Daerah dan Desa

Untuk perencanaan kegiatan pembangunan disuatu desa, harus didukung dengan keselarasan antara program di Kabupaten dan Desa dengan penyusunan RPJMD maupun RKPD. Dari hasil RPJMD dan RKPD mendapat panduan untuk mekanisme perancangan pembangunan dengan rangkain analisis sistematis menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan prinsip pembangunan suatu wilayah, kebijakan, rencana dan program sebagai penyusunan dokumen RPJM Desa dan RKP Desa untuk peningkatan pembangunan-pembangunan di desa.

Anggaran dan Pelaksanaan Pembangunan Sektor Pertanian Desa Pucung

Desa memerlukan sebuah anggaran untuk memenuhi suatu sarana dan prasarana pendukung pembangunan. Keuangan atau anggaran menjadi hak dan kewajiban pembiayaan segala infrastruktur desa untuk mendapatkan sebuah pendapatan, pembelanjaan, pembiayaan yang dikelola untuk pembangunan desa. Dengan adanya anggaran dana ini menjadi sebuah perwujudan agar pembangunan desa pucung menjadi maju. Anggaran desa ini dikatakan sebagai alokasi dana desa.

Sejak terjadinya rob yang melanda serta adanya covid 19, mulai tahun 2019 hingga 2021 Desa Pucung setiap adanya kegiatan pertanian, selalu menggunakan anggaran dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang didapat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pekalongan. Pencairan alokasi dana desa ini dengan bantuan dari camat. Anggaran-anggaran ini berkontribusi untuk kegiatan pertanian Desa Pucung yang meliputi kegiatan pembangunan sarana prasarana penunjang sektor pertanian, pemberdayaan masyarakat berupa pembiayaan kegiatan pembangunan usaha tani, serta kegiatan pengembangan.

1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Sektor Pertanian

Dalam hal pembangunan sarana dan prasarana Desa Pucung Tirto Kecamatan Pekalongan, terdapat suatu indikator untuk dijadikan sekelompok sebagai penampung hasil dari penunjang pembangunan pertanian. Klasifikasi pengindikatoran yang dapat dikelompokkan dalam jenis sarana dan prasarana yaitu :

- a. Adanya pasar permintaan hasil pertanian yang mempengaruhi petani untuk terus melakukan proses produksi seara berkelanjutan. Karena hasil dari produksi petani Desa Pucung yang berupa produksi padi, jagung, tebu serta sayuran hasilnya dijual untuk pemenuhan pangan masyarakat sekitar Kabupaten/Kota Pekalongan.
- b. Tersedia teknologi yang diperlukan untuk memproduksi sebagai penunjang keperluan permintaan pasar demi ketahanan pangan bersama serta teknologi tepat guna (TTG) atau teknologi tepat sasaran yang diberikan secara langsung kepada petani atau kelompok tani atau dikelola desa itu sendiri yang dimana TTG ini berfungsi untuk mendorong produktivitas yang efisien dan efektif untuk perbaikan mutu.
- c. Pemeliharaan sarana dan prasarana seperti pembngunan jalan usaha tani Di Desa Pucung dengan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun 2019 dengan dana sebesar Rp. 145.000.000 dengan pengadaan pekerjaan kontruksi secara langsung.

2. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan (Noor, 2011). Upaya pemberdayaan masyarakat ini mampu memberikan partisipasi masyarakat sekitar Desa Pucung menjalankan program yang ada menyangkut pertanian. Kegiatan pemberdayaan yang ada di Desa Pucung meliputi kegiatan-kegiatan penyuluhan sebagai pelatihan kepada kelompok tani bagaimana cara-cara untuk mengatasi masalah yang ada pada pertanian. Kemudian memberikan informasi seperti bagaimana penggunaan bibit yang baik.

Selain itu, dalam Kecamatan Tirto sendiri juga membangun sebuah Balai Penyuluhan Pertanian milik Kecamatan Tirto yang dimana balai ini digunakan unruk menampung data luas dan lahan pertanian di Kecamatan Tirto serta juga memberikan informasi mengenai data dan memberikan solusi atas permasalahan pertanian yang ada di Kecamatan Tirto.

3. Pembiayaan Penunjang Usaha Tani

Pembiayaan penunjang usaha tani dilakukan dengan penyediaan kredit usaha tani untuk biaya produksi pengolahan hasil dari pertanian. Akses kredit ini nantinya dikelola pada suatu badan. Di Desa Pucung sendiri, badan pengelola usaha tani dibentuk dengan nama Badan Usaha Milik Desa atau yang disingkat BUMDes dengan nama BUMDes Sumber Makmur Desa Pucung.

Untuk pelaksanaannya, maka perlu sebuah pembiayaan anggaran dari pemerintah berupa dana alokasi langsung yang didapat dari Pendapatan Asli Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah untuk memberikan kontribusi Badan Usaha Milik Desa terhadap pengelolaan pangan pertanian. Pada tahun 2021 pemerintah Kabupaten Pekalongan mengalokasikan dana desa ke Desa Pucung dengan nominal sebanyak Rp. 17.910.000 digunakan untuk penyelenggaraan pembangunan serta peberdayaan masyarakat desa.

4. Pengembangan Kegiatan Pertanian

Dalam pengembangan pertanian Desa Pucung, masyarakat setempat melakukan pengembangan inovasi dengan pemanfaatan teknologi menghasilkan pengembangan pembuatan pupuk organik cair yang nantiya pupuk tersebut digunakan untuk membantu proses pertumbuhan area pertanian. Pembuatan pupuk organik ini dikembangkan sebagai bisnis masyarakat setempat dan pastinya akan mendapatkan sebuah pendapatan atas usaha yang dihasilkan.

Selain pupuk, hasil dari pertanian juga dapat dijual belikan kepada masyarakat lain untuk memenuhi kebutuhan pangan dan pemenuhan kebutuhan pangan ini menjadi tolak ukur besar yang berkaitan dengan ketahanan pangan masyarakat agar panganan tetap terjaga secara baik dan tidak mengalami krisis kekurangan gizi akibat kurangnya konsumsi pangan yang minim.

Faktor-Faktor yang Berpengaruh Pada Pengimplementasian Pembangunan Pertanian di Desa Pucung Tirto

1. Faktor Pendukung

Faktor yang menjadi pendukung pembangunan pertanian di Desa Pucung antara lain adanya sebuah kebijakan otonomi desa tersebut sebagaimana juga diatur dalam Undang-Undang yang ada menjadi sistem acuan untuk dijadikan landasan bagaimana pengaturan pengelolaan pembangunan pertanian yang tertata agar dipandang sah atau nyata oleh negara artinya bersifat legal.

Faktor internal dianggap paling menunjang pembangunan pertanian menurut dari penelitian sebelumnya tentang Faktor Pendorong dan Penghambat Wisata Edukasi Pertanian di Balai Benih Hortikultura Kabupaten Garut dan penelitian lain yang serupa mengatakan bahwa pendukung pembangunan pertanian berupa dari daya dukung lahan yang memadai karena keberadaan fasilitas yang memiliki fungsi serta dukungan dari SDM (Mani & Trimono, 2021) yang menjadi pendukung pembangunan pertanian ini adalah dari pengetahuan kelompok tani yang memadai serta peran dari masyarakat itu untuk membantu mengembangkan dan mewujudkan semua program-program yang dibuat dan perlu juga peran masyarakat desa menjadi anggota sebuah koperasi kecil-kecilan untuk melihat jelas pengembangan pembangunan pertanian yang ada berdasarkan informasi-informasi pertanian dari Badan Penyuluhan Pertanian Kecamatan Tirto.

2. Faktor Penghambat

Faktor penghambat pembangunan pertanian di Desa Pucung Tirto ini kurangnya pemanfaatan perlindungan yang diberikan berupa asuransi usaha tani karena pemahaman kelompok tani yang minim tentang penggunaan asuransi tani tersebut. Dan juga jika pengetahuan SDM masyarakat yang minim juga menjadi penghambat untuk penyelenggaraan pembangunan pertanian. Faktor penghambat lainnya yaitu berupa kondisi lingkungan sekitar pertanian yang terkena rob, karena di Desa Pucung sendiri termasuk wilayah yang terdampak rob jika terjadi musim hujan secara terus menerus yang dapat mengakibatkan banjir pada kawasan pertanian dan ini berdampak pada hasil panen produksi pertanian di Desa Pucung tersebut.

Simpulan

Pembangunan pertanian Desa Pucung, Kecamatan Tirto Pekalongan dengan bagaimana implementasi otonomi daerah yang di tuangkan dalam RPJMD maupun RKPD mampu mengidentifikasi bagaimana pengimplementasian rencana pembangunan suatu daerah jangka menengah dan rencana kerja pembangunan daerah di bidang pertanian. Otonomi desa yang disesuaikan untuk pembangunan pertanian Desa Pucung Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan sejak 2019 hingga 2021 dana yang dianggarkan sebanyak Rp. 327.062.000 yang didapat dari pencairan alokasi dana desa yang dimana alokasi dana desa itu diraih dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pekalongan.

Dengan anggaran tersebut, pelaksanaan pembangunan pertanian meliputi pembangunan sarana dan prasarana yang memberikan sebuah pasar permintaan, teknologi dan pembangunan saluran pada tahun 2014 dengan dana Rp. 145.000.000 dari APBD. Dan kemudian menghasilkan sebuah kegiatan-kegiatan lain berupa pemberdayaan masyarakat dengan sebuah penyuluhan, melakukan pembiayaan penunjang tani dengan mengelola menggunakan bantuan sebuah pembentukan Bumdes (Badan Usaha Milik Desa) yang berkontribusi memberikan anggaran dana untuk ketahanan pangan sebesar Rp. 17.910.000 dengan melakukan bekal pemberdayaan masyarakat tadi.

Implementasi pembangunan pertanian Desa Pucung juga didukung faktor-faktor yang ada berdasarkan kebijakan desa serta peran sumber daya masyarakat yang mendukung terselenggaranya pembangunan pertanian, namun selain itu, faktor penghambat juga menjadi faktor sebuah permasalahan

yang ada dalam jalannya pembangunan pertanian seperti minimnya pengetahuan masyarakat dan kondisi lingkungan disekitar area pertanian akibat rob.

Saran yang dapat diberikan untuk memperlancar pembangunan pertanian di Desa Pucung Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, melakukan sebuah rencana untuk mengembangkan potensi sumber daya masyarakat tentang pentingnya menjaga pertanian untuk mempertahankan pangan dengan didorong dengan melakukan sebuah penyuluhan yang diberikan dari suatu badan yang dibentuk seperti Badan Penyuluhan Pertanian dari tingkat Kecamatan Tirto itu sendiri serta Badan Usaha Milik Desa Pucung itu sendiri.

Daftar Pustaka

- Arham, I., Sjaf, S., & Darusman, D. (2019). Strategi Pembangunan Pertanian Berkelanjutan di Pedesaan Berbasis Citra Drone (Studi Kasus Desa Sukadamai Kabupaten Bogor). *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 17(2), 245. <https://doi.org/10.14710/jil.17.2.245-255>
- Dumasari, D. (2020). Pembangunan Pertanian Mendahulukan yang Tertinggal. *Pustaka Pelajar*, 1–183.
- Klau, A. D., Rustiadi, E., & Siregar, H. (2019). Analisis Pengembangan Kawasan Agropolitan Berbasis Tanaman Pangan Di Kabupaten Malaka Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Journal of Regional and Rural Development Planning (Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah Dan Perdesaan)*, 3(3), 172–179.
- Mani, S. Al, & Trimo, L. (2021). Faktor Pendorong Dan Penghambat Pembangunan Wisata Edukasi Pertanian Di Balai Benih Hortikultura Kabupaten Garut. *Mimbar Agribisnis: Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*, 7(1), 973. <https://doi.org/10.25157/ma.v7i1.4898>
- Mayrowani, H. (2012). The Development of Organic Agriculture in Indonesia. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 30(2), 91–108.
- Noor, M. (2011). Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah CIVIS*, 1(2), 88. <https://doi.org/10.2307/257670>.Poerwanto.
- Setyowati, N. (2012). Analisis peran sektor pertanian di kabupaten sukoharjo. *SEPA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis*, 8(2).
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitaif, Kualitatif, dan R&DSugiyono. 2013. “Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitaif, Kualitatif, dan R&D.” Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitaif, Kualitatif, dan R&D. <https://doi.org/10.1>. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitaif, Kualitatif, Dan R&D*.